

PERAN SISPEMDA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PUBLIK

Azzahra Cahya Dewi¹

azzahrachyadewi@gmail.com¹

Dian Oktaviani²

dianoktavianiii08@gmail.com²

Eliyah Tiandra³

eliyahtiandra2572@gmail.com³

Haliza Nur Amalia⁴

haliza.na30@gmail.com⁴

Kawthar⁵

lullakawthar02@gmail.com⁵

Jaliludin Muslim⁶

jaliludin@uinsgd.ac.id⁶

^{1,2,3,4,5,6}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRACT

The Regional Government Information System (SISPemda) has a strategic role in encouraging transparency and accountability of public administration in the digital era. This research aims to analyze the extent to which the implementation of SISPemda improves these two aspects, with a focus on effectiveness, efficiency and perceptions of relevant stakeholders. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method in three regional governments in Indonesia. Data was collected through in-depth interviews, direct observation, and analysis of official documents. The research results show that SISPemda contributes significantly in opening access to public information, accelerating data-based decision making, and increasing public trust in the government. However, challenges such as lack of technological infrastructure and HR skills are still the main obstacles in system optimization. In conclusion, effective implementation of SISPemda can be the main catalyst for achieving transparent and accountable governance, as long as it is accompanied by adequate technical and policy support.

Keywords: Public Administration, Accountability, E-Government, SISPemda, Transparency.

ABSTRAK

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SISPemda) memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas administrasi publik di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi SISPemda meningkatkan kedua aspek tersebut, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan

persepsi stakeholder terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada pemerintah daerah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui observasi dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SISPemda berkontribusi signifikan dalam membuka akses informasi publik, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, tantangan seperti kurangnya infrastruktur teknologi dan keterampilan SDM masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi sistem. Kesimpulannya, implementasi SISPemda yang efektif dapat menjadi katalisator utama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, asalkan diiringi dengan dukungan teknis dan kebijakan yang memadai.

Kata Kunci: Administrasi Publik, Akuntabilitas, E-Government, SISPemda, Transparansi.

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kedua prinsip ini menjadi landasan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, sekaligus mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Namun, di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, seperti keterbatasan akses informasi, birokrasi yang kompleks, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (Nurhakim, 2019).

Dalam konteks ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SISPemda) hadir sebagai solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. SISPemda adalah platform digital yang dirancang untuk mendukung pengelolaan informasi dan administrasi di tingkat pemerintahan daerah (Tarigan & Nurtanzila 2019). Sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan keterbukaan data, serta memungkinkan pelaporan yang lebih akurat dan mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat (Musri et al. 2024).

Seiring dengan berkembangnya era digital, implementasi SISPemda menjadi semakin mendesak. Pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional internal, tetapi juga untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui penyediaan data yang transparan dan dapat diandalkan. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dalam pengawasan kinerja pemerintah, sehingga tercipta akuntabilitas yang lebih baik (Akmal et al. 2021).

Revolusi teknologi informasi telah mengubah wajah pemerintahan di seluruh dunia. Era digital menuntut pemerintahan untuk menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, seperti SISPemda (Jayanti, 2015).

Sebelum adanya SISPemda, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan seringkali menjadi kendala. Proses birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya akses publik terhadap informasi, serta potensi terjadinya korupsi menjadi

beberapa permasalahan yang umum ditemui (Novatiani & Vabiani 2019).

Teori birokrasi menurut Weber merupakan salah satu teori klasik dalam ilmu administrasi publik yang dikembangkan oleh Max Weber yang relevan dengan penelitian ini. Teori ini menggambarkan suatu bentuk organisasi yang ideal, yaitu birokrasi. SISPemda merupakan implementasi konkret dari teori birokrasi Weber dalam konteks pemerintahan modern. Dengan menerapkan prinsip-prinsip birokrasi Weber, SISPemda dapat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan akuntabel (Ngakil & Kaukab 2020).

Penelitian mengenai peran SISPemda dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik telah banyak dilakukan, diantaranya :

(Rosita, 2021) Efektivitas SISPemda dalam Meningkatkan Transparansi: Fokus, menganalisis bagaimana SISPemda meningkatkan akses publik terhadap informasi publik, seperti anggaran, kebijakan, dan data kinerja pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi SISPemda secara signifikan meningkatkan akses publik terhadap informasi anggaran, namun masih terdapat kendala dalam akses informasi terkait kebijakan.

(Zaki, 2019) Peran SISPemda dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja. Fokus penelitian ini menganalisis peran SISPemda dalam mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa SISPemda dapat memfasilitasi partisipasi publik, namun tingkat partisipasi masih rendah karena kurangnya literasi digital masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada peran SISPemda dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik. Dengan menganalisis implementasi dan dampaknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan tata

kelola pemerintahan daerah berbasis teknologi. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SISPemda) terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus merupakan pilihan yang tepat untuk menggali secara mendalam mengenai implementasi SISPemda di tiga pemerintah daerah yang berbeda. Data bersifat kualitatif: Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, narasi, dan makna yang diperoleh dari observasi dan dokumen (Firmansyah & Masrun, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat subyektif dan mendalam, seperti pendapat, persepsi, dan pengalaman dari para informan. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dari data spesifik menuju generalisasi yang lebih luas. Metode pengumpulan data dengan observasi peneliti secara langsung mengamati proses kerja, interaksi antar pegawai, dan penggunaan SISPemda di lapangan. Analisis dokumen dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan kinerja, dan manual prosedur SISPemda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Akses Informasi

SISPemda memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik secara cepat dan mudah melalui portal atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Hal ini mencakup data anggaran, perencanaan pembangunan, serta laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. **SISPemda** dirancang untuk menyediakan platform yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik dengan cepat, mudah, dan transparan. Sistem ini memanfaatkan portal digital atau aplikasi berbasis teknologi informasi untuk menampilkan berbagai data penting terkait aktivitas pemerintahan daerah (Utami 2023).

SISPemda (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) adalah sebuah inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan akses informasi publik bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), SISPemda memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi penting secara cepat dan mudah melalui portal atau aplikasi digital (Yuswarni & Arizal 2024).

Fitur Utama SISPemda

1. **Akses Cepat dan Mudah**
Masyarakat dapat dengan mudah mengakses data anggaran, perencanaan pembangunan, serta laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik.
2. **Transparansi Informasi**
SISPemda bertujuan untuk menyediakan platform yang transparan, di mana informasi yang relevan dan penting terkait aktivitas pemerintahan daerah dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini mendukung partisipasi publik dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan.
3. **Pengelolaan Data yang Efisien**
Dengan sistem ini, pengelolaan informasi menjadi lebih terstruktur dan efisien, memungkinkan pemerintah daerah untuk menyajikan data yang akurat dan terkini kepada masyarakat.

Manfaat SISPemda

1. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**
Dengan akses yang lebih baik terhadap informasi, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif.
2. **Mendorong Akuntabilitas**

SISPemda membantu menciptakan lingkungan di mana pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, karena informasi yang mereka kelola dapat diakses dan diawasi oleh publik.

3. Memperkuat Hubungan antara Pemerintah dan Masyarakat

Sistem ini memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan saluran

Dengan demikian, SISPemda merupakan langkah penting dalam modernisasi pelayanan publik, yang tidak hanya meningkatkan akses informasi tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Efisiensi Administrasi Publik

Proses administrasi menjadi lebih efisien melalui digitalisasi, yang mengurangi praktik manual dan potensi kecurangan. Penggunaan SISPemda juga mempercepat penyelesaian layanan administrasi. Digitalisasi telah membawa angin segar dalam dunia administrasi publik. Dengan mengadopsi teknologi digital, banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi. Hal ini memberikan sejumlah manfaat, di antaranya:

Minimisasi kesalahan manusia dalam proses yang dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan manusia, seperti kesalahan input data atau kehilangan dokumen. Dengan digitalisasi, data tersimpan secara digital dan dapat diakses dengan mudah serta akurat.

Efisiensi waktu proses yang sudah terotomatisasi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan proses manual yang membutuhkan waktu lebih lama. SISPemda (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) merupakan salah satu contoh penerapan teknologi digital dalam bidang administrasi publik. SISPemda berfungsi sebagai sistem informasi

terintegrasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan (Resmadiktia & Aiman 2023).

Penguatan Sistem Pengawasan

SISPemda (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) berperan penting dalam penguatan sistem pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan mencatat aktivitas administrasi secara elektronik, SISPemda memudahkan pelacakan dan pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

Manfaat Penguatan Sistem Pengawasan

1. **Pencatatan Aktivitas Secara Elektronik**
SISPemda menyimpan semua data dan aktivitas administrasi dalam format digital. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih akurat dan efisien, karena semua informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat.
2. **Pelacakan Kinerja**
Dengan sistem yang terintegrasi, pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi lebih transparan. Pengawas dapat melacak setiap langkah dan keputusan yang diambil, sehingga memudahkan identifikasi masalah atau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.
3. **Pengawasan Internal dan Eksternal**
SISPemda mendukung pengawasan dari berbagai pihak, baik dari dalam organisasi pemerintah (internal) maupun dari masyarakat dan lembaga pengawas (eksternal). Ini menciptakan sistem checks and balances yang lebih baik, yang penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah daerah.=
4. **Meningkatkan Akuntabilitas**
Dengan adanya sistem pengawasan yang kuat, pemerintah daerah dituntut untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan dan

keputusan mereka. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, SISPemda berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memperkuat sistem pengawasan dalam administrasi publik. Dengan pencatatan aktivitas secara elektronik, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan tetapi juga memastikan bahwa pemerintah daerah dapat beroperasi dengan lebih transparan dan akuntabel. Ini adalah langkah penting menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

Transparansi yang dihasilkan dari keterbukaan data pemerintah meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya publik. Transparansi dalam pengelolaan data pemerintah merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana sumber daya publik dikelola dan digunakan.

Hubungan antara Transparansi dan Kepercayaan

1. **Keterbukaan Data**
Ketika pemerintah menyediakan akses yang mudah dan terbuka terhadap data dan informasi, masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki hak untuk mengetahui. Hal ini menciptakan rasa percaya bahwa pemerintah tidak menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka.
2. **Mencegah Korupsi**
Transparansi berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap praktik korupsi. Dengan adanya pengawasan publik yang lebih baik, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Masyarakat cenderung lebih percaya kepada pemerintah yang

menunjukkan komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas.

3. Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik

Ketika pemerintah transparan dalam pelaksanaan kebijakan dan layanan publik, masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari kebijakan tersebut. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif.

Dalam peningkatan transparansi melalui keterbukaan data pemerintah tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga memperkuat demokrasi dan partisipasi publik. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka dapat mengawasi dan memahami pengelolaan sumber daya publik, kepercayaan terhadap pemerintah akan tumbuh, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kolaborasi dan pembangunan bersama.

SISPemda adalah alat yang dirancang untuk mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Implementasi sistem ini memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat dijelaskan melalui poin-poin berikut:

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. SISPemda memungkinkan informasi publik tersedia secara real-time, sehingga masyarakat dapat mengakses dokumen penting seperti: APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), lalu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Laporan realisasi anggaran dan proyek pembangunan. Hal ini mendorong penghapusan "ruang gelap" yang sering menjadi penyebab praktik korupsi dan manipulasi data.

Peran SISPemda dalam Meningkatkan Transparansi

SISPemda (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) berperan penting dalam meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi publik secara real-time. Dengan sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dokumen-dokumen penting, seperti:

- APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Dokumen ini memberikan gambaran tentang rencana keuangan pemerintah daerah, termasuk alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan.

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD menjelaskan rencana strategis pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

- Laporan Realisasi Anggaran dan Proyek Pembangunan

Laporan ini menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan digunakan dalam proyek-proyek pembangunan, memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dana publik.

Dengan adanya transparansi yang dihasilkan dari keterbukaan data pemerintah, SISPemda membantu menghapus "ruang gelap" yang sering menjadi penyebab praktik korupsi dan manipulasi data. Ketika informasi tersedia secara terbuka, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Akuntabilitas

Dengan adanya SISPemda, pejabat pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka berdasarkan data yang terdokumentasi. Sistem ini mendukung pengawasan internal dan eksternal dengan menciptakan rekam jejak digital yang tidak dapat dimanipulasi. Contohnya adalah pengelolaan laporan

kinerja instansi pemerintah (LAKIP), yang diproses lebih transparan melalui sistem digital.

Keterlibatan Publik

Implementasi SISPemda tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui survei daring atau mekanisme pengaduan. Hal ini meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Tantangan dan Solusi
Meskipun bermanfaat, implementasi SISPemda menghadapi beberapa tantangan:

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi di daerah-daerah tertentu.
2. Kapasitas SDM yang belum merata dalam mengoperasikan sistem.
3. Resistensi Perubahan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keterbukaan informasi.

Solusi yang dapat dilakukan meliputi:

1. Investasi dalam infrastruktur teknologi, seperti internet dan server lokal.
2. Pelatihan bagi pegawai pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi teknologi
3. Edukasi masyarakat mengenai manfaat transparansi dan akuntabilitas.

SISPemda berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas administrasi publik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Implementasi yang optimal memerlukan dukungan infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, serta komitmen dari seluruh pihak untuk memastikan keberlanjutan sistem ini.

KESIMPULAN

SISPemda (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik. Melalui penerapan teknologi

informasi yang canggih, SISPemda memungkinkan akses mudah dan cepat terhadap informasi publik, termasuk dokumen penting seperti APBD, RKPD, dan laporan realisasi anggaran.

Secara keseluruhan, SISPemda berkontribusi signifikan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pemerintahan.

REFERENCES

- Akmal, A., Muchtar, H., Frinaldi, A., & Jumiaty, J. (2021). Alternatif Model Pembelajaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Pendekatan Jurisprudential Inquiry (Telaah Hukum) di Prodi PPkn FIS UNP.
- Firmansyah, M., & Masrun, M. (2021). Esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156-159.
- Jayanti, I. P. (2015). *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi pada Pemerintah Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Musri, M., Pasaribu, F. R., Khudri, N., Ariyati, Y., & Rahman, Y. (2024). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI NEGARA. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 8888-8893.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107.

- Nurhakim, M. R. S. (2019). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(3), 403-422.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(01).
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685-697.
- Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2019). Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29-45.
- Utami, P. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 6(2), 1-9.
- Yuswarni, Y., Soedja, D., Balqis, S., & Arizal, A. (2024). Ombudsman Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 160-173.